



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Urip Sumoharjo No. 269 Makassar

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah rencana strategis perangkat daerah periode 5 tahunan yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan/atau urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPD dan bersifat indikatif; sedangkan Renja Perangkat Daerah adalah rencana kerja perangkat daerah periode 1 tahun yang memuat program, kegiatan, sub keegiatan, lokasi dan kelompok sasaran disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) dan tetap memperhatikan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga. Renja Perangkat Daerah ini menjadi acuan bagi Kabupaten/Kota dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tingkat Kabupaten/Kota.

Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2024 - 2026.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sesuai Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu, agar pelaksanaan tugas yang diberikan berjalan efektif dan terarah maka penyusunan dan penetapan Rencana Kerja OPD menjadi mutlak sebagai pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun berjalan.

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*, sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*), yaitu pemerintah lebih focus pada pencapaian kinerja yang lebih baik.

Proses penyusunan rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal Rencana kerja Perangkat Daerah (RKPD). Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan atau paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (renja) Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya tahapan penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, dan Kepala OPD menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD yang digunakan dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berjalan.

Dimana prinsip penyusunan Rencana Kerja (Renja) antara lain :

1. Substansi Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja Perangkat Daerah yang disesuaikan dengan Perkada RKPD;
2. Program dan Kegiatan dirinci berdasarkan sumber dana yang diusulkan;
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan dokumen resmi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar : Bagan Alur Tahapan Renja PD

Adapun persiapan penyusunan Renja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja;
 - Orientasi mengenai Renja;
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Kerja;
 - Pengumpulan data dan informasi.
- b. Pengelolah Data dan informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.
- c. Tahap perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan data dan informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan OPD;
 - Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah;
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD;
 - Telaahan terhadap rancangan awa RKPDP;
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - Penyempurnaan rancangan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - Pembahasan Forum Perangkat Daerah;
 - Penyesuaian dokumen rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah;

- Penyajian dan penyampaian rancangan Rencana Kerja;
- Verifikasi dan penyempurnaan rancangan Rencana Kerja yang mengacu pada rancangan akhir RKPD;
- Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup OPD merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan dari proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan-tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erta antara satu dengan lainnya.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 adalah :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri 26 Tahun 2005 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 315);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pengawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 1447)
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 548);

- 19) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan : (7/2015, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
- 20) Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 1);
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309);
- 22) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, Nomor 1);
- 23) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 50);
- 24) Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 30);
- 25) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Kerja adalah untuk memenuhi regulasi kebijakan yang berkembang, perencanaan yang menjadi rujukan, isu strategis dan sebagai instrument perencanaan dan penganggaran periodik berfungsi sebagai berikut:

- a. Sebagai acuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengaplikasikan perencanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
- b. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan sesuai dengan tupoksi OPD;
- c. Menjadi tolok ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan bagi OPD.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah :

- a. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. Perwujudan efisiensi dan efektifitas dalam alokasi sumber daya berdasarkan pertimbangan pagu indikatif dan skala prioritas;
- c. Terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;
- d. Menjadi tolok ukur kinerja bagi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dalam menilai implementasi program serta kegiatan Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rencana kerja (RENJA) Tahun 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berisi tentang Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023 yang didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta kewenangan berdasarkan pasal 255, 256, dan 257 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Untuk mendukung arah kebijakan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan antara lain peningkatan kapasitas birokrasi dan kelembagaan.

1.2. Landasan Hukum

Memuat dasar regulasi sebagai acuan kebijakan dalam perencanaan dan penganggaran.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengaju pada

hasil laporan kinerja tahunan PD dan/atau realisasi APBD untuk PD yang bersangkutan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan, sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Dirumuskan berdasarkan analisis gambaran pelayanan PD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra PD.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Berisikan hasil kajian terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang diusulkan paron pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra PD, sesuai dengan tupoksi OPD, isu-isu penting penyelenggaraan Pemda, diidentifikasi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah pada tahun perencanaan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat faktor-faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program/kegiatan/sub kegiatan.

BAB V PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II**HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah**

Evaluasi terhadap Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan meliputi 3 (tiga) hal, yaitu realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, realisasi program/kegiatan sub kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Selain itu juga dibahas mengenai implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD dan kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut. Secara umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk melaksanakan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara kepala dinas beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Plafon anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 sebesar Rp. 44.653.050.060,00 dengan realisasi sebesar Rp. 43.964.272.865,00 atau 98,46% dengan tingkat capaian kinerja 99,72%.

Berikut Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program/kegiatan/sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :

NAMA ORGANISASI/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA RENJA	
	TOLAK UKUR	TARGET		K	(Rp)	Rp(%)	K (%)
Satuan Polisi Pamong Praja			44.653.050.060,0		43.964.272.865,0	98,46	99.72
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penurunan Temuan berdasarkan LHP	100 %	42.250.851.760,0	100 %	41.642.770.156,0	98.56	99.83
	Persentase ASN Perangkat daerah berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100 %		100 %			
	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100 %		100 %			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	100 %	303.007.800,0	100 %	285.391.943,0	94.19	99.17

	Daerah tepat waktu						
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	236.829.900,0	3 Dokumen	230.634.096,0	97.38	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	9.514.000,0	1 Dokumen	6.054.000,0	63.63	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	27.297.250,0	1 Dokumen	23.478.197,0	86.01	100.00
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	5.739.500,0	1 Dokumen	3.059.500,0	53.31	56.31
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	8.264.900,0	1 Dokumen	7.484.900,0	90.56	100.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1 Laporan	6.801.500,0	1 Laporan	6.151.500,0	90.44	100.00

	SKPD							
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat	4 Laporan	8.560.750,0	4 Laporan	8.529.750,0	99.64	100.00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	20.303.107.206,0	100 %	20.036.009.805,0	98.68	99.92	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	20.236.324.706,0	12 Bulan	19.986.391.857,0	98.76	100.00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	5.264.300,0	12 Dokumen	5.264.300,0	100.00	100.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	39.071.500,0	1 Laporan	21.911.948,0	56.08	56.10	
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	3.469.500,0	20 Dokumen	3.469.500,0	100.00	100.00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran yang disusun	18 Laporan	18.977.200,0	18 Laporan	18.972.200,0	99.97	100.00	

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Aset/Barang Perangkat Daerah Tepat Waktu	100 %	5.914.000,0	100 %	5.794.000,0	97.97	100.00
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	1.234.500,0	2 Dokumen	1.234.500,0	100.00	100.00
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	4.679.500,0	3 Laporan	4.559.500,0	97.44	100.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100 %	145.394.000,0	100 %	144.925.490,0	99.68	100.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	255 Paket	112.420.000,0	255 Paket	112.064.490,0	99.68	100.00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	340 Dokumen	32.974.000,0	340 Dokumen	32.861.000,0	99.66	100.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	399.240.100,0	100 %	377.647.389,0	94.59	96.40
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	57 Paket	2.242.000,0	57 Paket	2.242.000,0	100.00	100.00
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	250 Paket	6.700.000,0	250 Paket	6.486.400,0	96.81	100.00

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11550 Paket	10.825.000,0	11550 Paket	10.650.000,0	98.38	99.90
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	19.970.000,0	1 Dokumen	18.170.000,0	90.99	95.86
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	10.864.000,0	1 Laporan	10.504.000,0	96.69	97.06
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan	343.087.600,0	150 Laporan	324.173.489,0	94.49	96.18
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5156 Dokumen	5.551.500,0	5156 Dokumen	5.421.500,0	97.66	98.00
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	234.882.500,0	100 %	233.847.836,0	99.56	100.00
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket			
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	50.000.000,0	1 Unit	49.737.646,0	99.48	100.00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit	184.882.500,0	8 Unit	184.110.190,0	99.58	100.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	20.484.894.154,0	100 %	20.222.733.663,0	98.72	100.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	17.772.000,0	12 Laporan	12.196.627,0	68.63	100.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	20.467.122.154,0	12 Laporan	20.210.537.036,0	98.75	100.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	374.412.000,0	100 %	336.420.030,0	89.85	90.07
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	261.228.000,0	25 Unit	229.145.710,0	87.72	88.10
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	87.204.000,0	9 Unit	81.384.320,0	93.33	93.00

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di pelihara	41 Unit	25.980.000,0	41 Unit	25.890.000,0	99.65	100.00
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi (SPM)	100 %	2.190.111.800,0	100 %	2.122.076.068,0	96.89	97.74
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan Kualitas Pelayanan keamanan dan ketertiban Serta Perlindungan masyarakat	100 %	1.939.004.100,0	100 %	1.932.535.768,0	99.67	100.00
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini	80 Kali	539.658.400,0	80 Kali	537.365.400,0	99.58	100.00
	Jumlah Tenaga Keamanan dari instansi vertical	12 Bulan		12 Bulan			
	Jumlah Pembinaan dan Penyuluhan	2 Kali		2 Kali			
	Jumlah Pelaksanaan Pengamanan, dan Pengawasan	120 Kali		120 Kali			
	Jumlah Pelaksanaan Patroli	80 Kali		80 Kali			

Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	7 Kasus	1.191.995.500,0	7 Kasus	1.190.879.368,0	99.91	100.00
	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	35 kasus		35 kasus			
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	15 Dokumen	48.966.700,0	15 Dokumen	45.919.500,0	93.78	100.00
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15 Dokumen		15 Dokumen			

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang	158.383.500,0	200 Orang	158.371.500,0	99.99	100.00
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	2 Dokumen		2 Dokumen			
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	80 Unit		80 Unit			
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Jumlah Kasus pelanggaran Perda dan Pergub yang diselesaikan	25 kasus	237.807.700,0	25 kasus	176.640.300,0	74.28	79.17
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	71.755.600,0	3 Laporan	65.742.550,0	91.62	100.00
Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan	65 Laporan	100.000.000,0	65 Laporan	94.997.650,0	95.00	100.00

Peraturan Gubernur	Peraturan Daerah dan Peraturan						
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25 Laporan	66.052.100,0	25 Laporan	15.900.100,0	24.07	25.02
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Preesentase Kuantitas PPNS terhadap ASN Satpol PP	10 %	13.300.000,0	10 %	12.900.000,0	96.99	100.00
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	2 Laporan	13.300.000,0	2 Laporan	12.900.000,0	96.99	100.00
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100 %	150.315.700,0	100 %	144.023.741,0	95.81	100.00
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	% Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	16.454.000,0	100 %	16.454.000,0	100.00	100.00
Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi	1 Dokumen	16.454.000,0	1 Dokumen	16.454.000,0	100.00	100.00
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap	100 %	82.188.600,0	100 %	77.096.641,0	93.80	100.00

Bencana	Bencana						
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Terkait dengan Kebencanaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	50 Orang	82.188.600,0	50 Orang	77.096.641,0	93.80	100.00
Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	51.673.100,0	100 %	50.473.100,0	97.68	100.00
Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	51.673.100,0	2 Dokumen	50.473.100,0	97.68	100.00
PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100 %	61.770.800,0	100 %	55.402.900,0	89.69	92.90
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	35 %	60.225.050,0	35 %	55.402.900,0	91.99	95.29
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan	1 Dokumen	11.998.900,0	1 Dokumen	11.550.900,0	96.27	100.00

Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal						
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 Laporan	45.389.250,0	1 Laporan	43.852.000,0	96.61	100.00
Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Dokumen	1.422.900,0	12 Dokumen			
Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	45 Orang	1.414.000,0	45 Orang			
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan	83 %	1.545.750,0	83 %			

Penyelamatan Non Kebakaran	Non Kebakaran						
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	2 Laporan	1.545.750,0	2 Laporan			

Berikut Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 (Tahun berjalan) dapat diuraikan pada Tabel TC. 29 sebagai berikut :

1					Urusan Wajib Pelayanan Daerah													
1	05				Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
1	05				Satuan Polisi Pamong Praja													
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
						Persentase ASN Perangkat Daerah Berkinerja Kategori Baik dan Sangat Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
						Persentase Penurunan Temuan Berdasarkan LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	01	1.01		Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	2 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100,00%
1	05	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100,00%
1	05	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100,00%
1	05	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100,00%
1	05	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	100,00%

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

Kode	Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)/ Subkegiatan (Suboutput)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program, Keluaran Kegiatan dan Sub Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
									Target Renja Perangkat Tahun (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
1	05	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun	1 Dokumen	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	4 Dokumen	24 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00%
1	05	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	150 Orang/Bulan	1 Tahun	1944 Orang/Bulan	1944 Orang/Bulan	100%	1944 Orang/Bulan	1944 Orang/Bulan	1296,00%
1	05	01	1.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Laporan	-	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100,00%
1	05	01	1.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	1 Laporan	27 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100,00%
1	05	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang dikelola	20 Laporan	-	20 Laporan	20 Laporan	100%	20 Laporan	20 Laporan	100,00%
1	05	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang disusun	18 Laporan	2 Laporan	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	18 Laporan	100,00%
1	05	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	% Penyusunan dokumen Laporan Aset/Barang Perangkat Daerah Tepat Waktu	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	01	1.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang tersusun	2 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00%
1	05	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah yang tersusun	3 Laporan	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Laporan	3 Laporan	100,00%

1	05	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	635 Orang	380 Orang	255 Orang	80 Orang	31%	255 Orang	255 Orang	40,16%
1	05	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Administrasi Kepegawaian	340 laporan	30 Jenis	340,00	340,00	100%	340 Jenis	340 Jenis	#VALUE!
1	05	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang tersedia	50 Unit	30 Unit	57,00	57,00	100%	50 Unit	50 Unit	100,00%
1	05	01	1.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	250 Unit	-	236 Unit	236 Unit	100%	250 Unit	250 Unit	100,00%
1	05	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Cetak dan Penggandaan yang tersedia	18000 Jenis	110 Jenis	18625 Jenis	18625 Jenis	100%	18000 Jenis	18000 Jenis	100,00%
1	05	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang tersedia	12 Bulan	12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
1	05	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Jamuan Makanan dan Minuman yang tersedia	100 Tamu	55,00	100 Tamu	100 Tamu	100%	100 Tamu	100 Tamu	100,00%
1	05	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	4 Rapat	180 Kali	4 Rapat	4 Rapat	100%	4 Rapat	4 Rapat	100,00%
1	05	01	1.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis Arsip Dinamis yang tertata	5000 Jenis	-	5156 Jenis	5156 Jenis	100%	5000 Jenis	5000 Jenis	100,00%
1	05	01	1.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website yang tersedia	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100,00%
1	05	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan operasional roda 4	2 Unit	-	-	-	0%	-	-	0,00%
1	05	01	1.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang tersedia	1 Paket	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Paket	1 Paket	100,00%
1	05	01	1.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	1 Paket	15,00	1 Unit	1 Unit	100%	1 Paket	1 Paket	100,00%
1	05	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	8 Unit	12,00	8 Unit	8 Unit	100%	8 Unit	8 Unit	100,00%

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

1	05	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah biaya tagihan telepon, internet, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100,00%
1	05	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	5808 Orang/Bulan	12 Bulan	1 Tahun	1 Tahun	100%	5808 Orang/Bulan	5808 Orang/Bulan	100,00%
1	05	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	01	1.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terbayarkan	25 Unit	25 Unit	25 Unit	25 Unit	100%	25 Unit	25 Unit	100,00%
1	05	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terbayarkan	9 Unit	13 Unit	9 Unit	9 Unit	100%	9 Unit	9 Unit	100,00%
1	05	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	41 Unit	150 Unit	41 Unit	41 Unit	100%	41 Unit	41 Unit	100,00%
1	05	1.05.02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi (SPM/Prioritas)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	1.05.02	01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan ketertiban umum Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	1.05.02	01	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini Pembinaan dan Penyuluhan Pelaksanaan Patroli Pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	277 kasus	200 Orang	80 Kali	80 Kali	100%	80 Kali	80 Kali	#VALUE!
								80 Kali	75 Kali	75 Kali	100%	75 Kali	75 Kali	#DIV/0!
								120 Kali	120 Kali	120 Kali	100%	120 Kali	120 Kali	#DIV/0!
								90 Kali	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	#DIV/0!
								23 Orang	23 Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	100%	23 Orang/Bulan	23 Orang/Bulan	#DIV/0!
1	05	1.05.02	01	02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	45 Kasus	35 Kali	35 Kali	35 Kali	100%	35 Kali	35 Kali	#VALUE!
								7 Kali	7 Kali	7 Kali	100%	7 Kali	7 Kali	#DIV/0!

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

1	05	1.05.02	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70 Lapoaran	20 Kali	10 Kali	10 Kali	100%	10 Kali	10 Kali	#VALUE!
								10 Kali	55 Kali	55 Kali	100%	55 Kali	55 Kali	#DIV/0!
1	05	1.05.02	02	03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25 Lapoaran	15 Kasus	25 Kasus	25 Kasus	100%	25 Kasus	25 Kasus	#VALUE!
1	05	1.05.02	03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil PPNS Provinsi	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	8 orang	100%	5%	0%	0%	10%	10%	#VALUE!
1	05	1.05.02	03	01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman	25 Laporan	35 Orang	22 Orang	Orang	0%	25 Orang	25 Orang	#VALUE!
1	05	1.05.02	03	02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif	30 Dokumen							

1					2		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
1	05	1.05.03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Korban Bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
							Persentase Aparat Kesiapsiagaan Bencana yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	1.05.03	01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi		% Layanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	-	-	#DIV/0!	100%	100%	100,00%
1	05	1.05.04	01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi		Jumlah dokumen kajian resiko bencana	(-)	3 Kali	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	1.05.04	01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)		Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	80 Orang	70 Orang	70 Orang	100%	0%	-	-	100,00%
1	05	1.05.03	02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	1.05.04	02	02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana		Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	60 Orang	3 Kali	3 Kali	100%	3 Kali	3 Kali	#VALUE!
1	05	1.05.03	04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00%
1	05	1.05.04	04	03	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	-	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	#VALUE!
1	05	1.05.04			PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran (Prioritas)	41%	100%	37%	37%	100%	40%	40%	97,56%
								(-)	100%	82%	82%	100%	83%	83%	#VALUE!
1	05	1.05.04	01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran		Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	50%	100%	25%	25%	100%	35%	35%	70,00%
1	05	1.05.04	01	01	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran			0 Dokumen	15 Kali	-	-	0%	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00%
1	05	1.05.04	01	03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Laporan	50 orang	-	-	0%	2 kali	2 kali	100,00%

1	05	1.05.04	01	04	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 dokumen	-	-	-	0%	12 Kab/kota	12 Kab/kota	#VALUE!
1	05	1.05.04	01	09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Orang	60 Orang	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	#VALUE!
1	05	1.05.04	02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	85%	100%	82%	82%	100%	83%	83%	97,65%
1	05	1.05.04	02	01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Laporan	50 Orang	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	#VALUE!
1	05	1.05.04	02	01	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Laporan	50 Orang	2 Kali	2 Kali	100%	2 Kali	2 Kali	#VALUE!

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dibentuk melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309) dan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan disajikan dalam tabel T-C.30 berikut. :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai Sakip Perangkat Daerah	-	Bobot Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	70	75	80	80	70	75	80	80	
2	Rata-Rata Capaian Kinerja Perangkat Daerah	-	Prosentase Realisasi Fisik dan Keuangan atas Program/kegiatan /sub kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Presentase ASN dengan Nilai SKP Kategori Baik	-	Prosentase SKP ASN berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	-	Prosentase Temuan Materil berdasarkan hasil audit	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Kuantitas Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang profesional dan terlatih	Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	Jumlah Aparat Satpol PP yang terlatih	550 Orang	625 Orang	750 Orang	750 Orang	550 Orang	625 Orang	750 Orang	750 Orang	
6	Presentase Aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Berkompetensi Fungsional Khusus	Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan	Jumlah Aparat Satpol PP yang lulus/berkompeten pada setiap tes inpassing	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No.	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	Tahun 2021 (thn n-2)	Tahun 2022 (thn n-1)	Tahun 2023 (thn n)	Tahun 2024 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Presentase Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8	Kuantitas Petugas Perlindungan Masyarakat		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	42000 Orang	42500 Orang	43000 Orang	43000 Orang	42000 Orang	42500 Orang	43000 Orang	43000 Orang	
9	Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran k3 (Keterlibatan, Ketenteraman, Keterlibatan)		Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	94%	95%	96%	96%	94%	95%	96%	96%	
10	Persentase Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran			55%	60%	65%	65%	55%	60%	65%	65%	
11	Persentase Respon Time Rate			88%	90%	95%	95%	88%	90%	95%	95%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Aspek strategis Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 1 (satu) huruf e, disebutkan bahwa ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang harus diselenggarakan dan menjadi tugas dari Kepala Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah tangan dari Kepala Daerah untuk membantu dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, dibentuk untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat.

Suasana tenang dan tertib menjadi modal dasar baik dalam menjalankan roda pemerintahan dan roda perekonomian, kedua hal tersebut akan berjalan optimal apabila kondisi menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat tidak tercipta dengan baik oleh sebab itu, ketiga aspek pelayanan dasar tersebut menjadi aspek strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja sehingga pemerintah berkewajiban mendukung penguatan kelembagaan dan penganggaran guna menunjang pelaksanaan cipta kondisi trantibum serta perlindungan masyarakat yang kondusif dan berjalan secara optimal.

Isu strategis berkaitan dengan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta perlindungan masyarakat berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Berdasarkan Capaian Kinerja Pembangunan Tahun 2018-2023, juga melihat fakta permasalahan yang krusial dan tantangan pada tahun 2024-2026, maka dapat digambarkan perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yaitu :

1. Kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang belum memadai, terutama anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan yang bersertifikasi/memiliki keahlian khusus seperti intelijen, PPNS maupun pengadaan barang/jasa masih minim, tentu saja sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan OPD;
2. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang ketugasan;
3. Koordinasi dan kerjasama antar instansi, kabupaten/kota, masyarakat, dan stake holders masih kurang;
4. Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah belum optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang semakin kompleks;
5. Wilayah perbatasan rawan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum yang masih belum mendapat perhatian khusus. Dukungan anggaran dan kerjasama dengan mitra kerja/ instansi terkait sangat diperlukan;
6. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah;

7. Dampak dari penanganan Extra Ordinary (Luar Biasa) akibat pandemi Covid-19 menjadi persoalan, tantangan dan ujian bersama;

Pemasalahan dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat berdampak terhadap Pencapaian Rencana Kerja PD Provinsi Sulawesi Selatan paradigma Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat Dan Penegakan Peraturan Daerah yang sebelumnya responsif (tanggap darurat) menjadi preventif (kesiagaan), untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas aparatur Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah.

Rekomendasi Strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan.

1. Aspek regulasi, perlu meningkatkan kompetensi serta kapasitas SDM dalam setiap organisasi, diperlukan sebuah kegiatan berupa Bimtek, Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) yang berjenjang agar mendapatkan pengetahuan yang mungkin belum didapatkan atau sebagai penyegaran kembali (refreshing);
2. Aspek kebutuhan personil yang merupakan sebuah pondasi yang sangat penting dalam aktivitas sebuah organisasi. Keberhasilan kinerja dalam aktivitas juga sangat ditentukan oleh SDM, berdasarkan kualitas (kapasitas, kompetensi) dan kuantitas SDM. Permasalahan SDM Satpol PP lebih banyak dititik beratkan pada kuantitasnya. Tidak ada rekrutmen baru untuk anggota PNS. Di luar hal tersebut, SDM Satpol PP harus menerima beban pekerjaan yang semakin besar dan cenderung bersifat tidak teratur/bersifat ad hoc
3. Aspek sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan untuk kegiatan patroli sesuai dengan SOP, bahwa Satpol PP melaksanakan patroli 3 (tiga) kali dalam sehari.
4. Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat Dan Perlindungan Masyarakat dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD dan RENSTRA Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam kedua dokumen tersebut, penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan belum menjadi kebijakan utuh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena masih menjadi bagian dalam kebijakan Kesbangpol. Atas dasar tersebut, perlu adanya komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat Dan Penegakan Peraturan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2021 tentang Standar

Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri yang tertuang dalam RKPD Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun-tahun mendatang.

Berdasarkan kebutuhan pendanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 bahwa Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sudah masuk dalam sub kegiatan, Satuan Polisi Pamong Praja masih membutuhkan sarana, prasarana dan anggaran yang memadai untuk membiaya program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Penyelenggaraan Ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan tugas pokok dan fungsinya pada awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) mengacu kepada 4 (empat) Program, 16 (Enam Belas) Kegiatan dan 53 (Lima Puluh Tiga) Sub Kegiatan, Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024 dapat dilihat pada tabel T-C.31.

Tujuan	Sasaran	Kode	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisis Kebutuhan				Lokasi
			Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	target Capaian	Pagu Indikatif	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Meningkatkan Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja			Nilai SAKIP OPD	BB				A			
Meningkatnya Capaian Kinerja Program penyelenggaraan Urusan Ketenteraman Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100%				100%			
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %	42.889.885.374,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %	43.548.885.374,00	
				Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	100 %	0,00		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	100 %	0,00	
				Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 %	0,00		Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 %	0,00	
		1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	508.343.100,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	548.343.100,00	
		1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	330.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	330.000.000,00	SULAWESI SELATAN
		1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	SULAWESI SELATAN
		1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	63.343.100,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	63.343.100,00	SULAWESI SELATAN

1.05.0 1.1.01. 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	25.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.01. 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	30.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.01. 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.01. 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	35.000.000,00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	45.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32 Laporan	21.120.742.755,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32 Laporan	21.198.742.755,00	
1.05.0 1.1.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	20.975.617.755,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	20.975.617.755,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.02. 04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	67.052.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	77.052.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.02. 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	21.107.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	54.107.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.02. 06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	10.516.000,00	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	35.516.000,00	SULAWESI SELATAN

1.05.0 1.1.02. 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	46.450.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	56.450.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	300 Unit	22.000.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	320 Unit	62.000.000,00	
1.05.0 1.1.03. 01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	30.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.03. 02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	12.000.000,00	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	32.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350 Laporan	275.800.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	360 Laporan	455.800.000,00	
1.05.0 1.1.05. 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	148 Paket	205.800.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	148 Paket	255.800.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.05. 03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	148 Dokumen	70.000.000,00	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	148 Dokumen	200.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	250 Unit	547.551.000,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	250 Unit	732.551.000,00	
		Jumlah Tamu Yang difasilitasi	120 Orang	0,00		Jumlah Tamu Yang difasilitasi	120 Orang	0,00	
1.05.0 1.1.06. 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	7.500.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	32.500.000,00	SULAWESI SELATAN

1.05.0 1.1.06. 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Paket	17.250.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Paket	27.250.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.06. 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	180 Paket	52.800.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	180 Paket	62.800.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.06. 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.200.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	44.200.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.06. 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	17.250.000,00	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	47.250.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.06. 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	300.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	340.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.06. 10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	28.551.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	28.551.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.06. 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	150.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	450.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	580.000.000,00	
1.05.0 1.1.07. 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	4 Unit	180.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.07. 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	SULAWESI SELATAN

1.05.0 1.1.07. 05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.07. 09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	150.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.07. 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	19.270.448.519,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	19.276.448.519,00	
1.05.0 1.1.08. 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.598.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	35.598.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.08. 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.240.850.519,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.240.850.519,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	76 Unit	695.000.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	85 Unit	695.000.000,00	
1.05.0 1.1.09. 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	275.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	275.000.000,00	SULAWESI SELATAN

1.05.0 1.1.09. 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	200.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	200.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.09. 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	100.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	100.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 1.1.09. 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120.000.000,00	SULAWESI SELATAN
Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Aman, Tenteraman dan Tertib		Persentase Penurunan Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban (K3)	100%				100%		
Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota		Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban umum)	100%				100%		
1.05.0 2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 %	4.085.000.000,00	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 %	5.206.000.000,00	
1.05.0 2.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	3.045.000.000,00	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	3.945.000.000,00	

1.05.0 2.1.01. 01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	277 Kasus	750.000.000,00	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	277 Kasus	830.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 2.1.01. 02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	45 Kasus	1.300.000.000,00	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	55 Kasus	1.700.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 2.1.01. 03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	16 Dokumen	230.000.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	16 Dokumen	270.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 2.1.01. 04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 Dokumen	100.000.000,00	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 Dokumen	130.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 2.1.01. 05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	240 Orang	280.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	240 Orang	450.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 2.1.01. 06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	50.000.000,00	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	70.000.000,00	SULAWESI SELATAN

1.05.0 2.1.01. 07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	150 Unit	250.000.000,00	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	250 Unit	350.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 2.1.01. 08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	35.000.000,00	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	45.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 2.1.01. 09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	50.000.000,00	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	100.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 2.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	840.000.000,00	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	1.031.000.000,00	
1.05.0 2.1.02. 01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	320.000.000,00	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	401.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 2.1.02. 02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70 Laporan	220.000.000,00	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70 Laporan	280.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 2.1.02. 03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25 Laporan	300.000.000,00	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25 Laporan	350.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 2.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	8 Orang	200.000.000,00	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	8 Orang	230.000.000,00	

1.05.0 2.1.03. 01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	25 Laporan	150.000.000,00	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	25 Laporan	150.000.000,00	SULAWESI SELATAN
	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan sekretariat PPNS	1 Surat keputusan	10.000.000,00	Pembentukan Sekretariat PPNS	Surat keputusan kepala daerah tentang pembentukan sekretariat PPNS	0	0,00	
1.05.0 2.1.03. 02	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	20 laporan	40.000.000,00	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	22 Laporan	50.000.000,00	SULAWESI SELATAN
Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota		Persentase Penurunan Korban Bencana							
1.05.0 3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100 %	725.000.000,00	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100 %	845.000.000,00	
1.05.0 3.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	325.000.000,00	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	355.000.000,00	
1.05.0 3.1.01. 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	80 Orang	325.000.000,00	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	80 Orang	355.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 3.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	300.000.000,00	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	350.000.000,00	

1.05.0 3.1.02. 02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	300.000.000,00	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	350.000.000,00	SULAWESI SELATAN
1.05.0 3.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	100.000.000,00	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	140.000.000,00	
1.05.0 3.1.04. 03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	100.000.000,00	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	140.000.000,00	SULAWESI SELATAN
Terwujudnya Penyelesaian Gangguan Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penanggulangan Bencana Daerah dan Bencana Kebakaran Kab/Kota		Persentase Kasus Kebakaran yang ditangani Sesuai Respon Time Rate							
1.05.0 4	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100 %	346.858.377,00	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100 %	446.858.377,00	
1.05.0 4.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	50 %	146.155.000,00	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	50 %	246.155.000,00	
1.05.0 4.1.01. 03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Laporan	76.500.000,00	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Laporan	176.500.000,00	SULAWESI SELATAN

1.05.0 4.1.01. 04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Dokumen	20.000.000,00	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Dokumen	20.000.000,00	SULAWESI SELATAN	
1.05.0 4.1.01. 09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	2 Orang	49.655.000,00	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	2 Orang	49.655.000,00	SULAWESI SELATAN	
1.05.0 4.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	200.703.377,00	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100 % %	200.703.377,00		
1.05.0 4.1.02. 01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Laporan	90.703.377,00	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Laporan	90.703.377,00	SULAWESI SELATAN	
1.05.0 4.1.02. 02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Laporan	110.000.000,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Laporan	110.000.000,00		
				48.046.743.751,00					49.046.743.751,00	

Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat

Program, kegiatan dan sub kegiatan masyarakat sepenuhnya diusulkan dari bidang teknis dan Sekretariat dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan. Usulan-usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut selanjutnya dievaluasi berdasarkan isu-isu strategis yang terdapat dalam masyarakat dengan disinkronkan sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan.

Selanjutnya seluruh usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyelaraskan dengan kebijakan perencanaan dan penganggaran yang ada. Adapun usulan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2024 belum melaksanakan Penelaahan Usulan Program, kegiatan dan sub kegiatan kepada masyarakat yang secara langsung menjadi program kegiatan dan sub kegiatan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada Tabel T-C.32 berikut :

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Sulawesi Selatan

Nama Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
-	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024. serta merujuk pada prioritas pembangunan Nasional sebagaimana termuat dalam RKP Tahun 2023 dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023.

3.1. Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026, yaitu : “

1. Sasaran Pokok RPJPD Provinsi Sulawesi Selatan 2005-2025;
2. Capaian Kinerja RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023
3. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
4. Permasalahan dan Isu-isu strategis Pembangunan Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut, Perumusan Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan mengacu pada mekanisme yang tercantum Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 dengan mempertimbangkan seluruh elemen, baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta

Adapun Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Sulawesi Selatan periode 2024 -2026 sebagai berikut:

- **Tujuan (1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik**
 - **sasaran 1 : meningkatnya akuntabilitaskinerja pemerintahan daerah**
 - **sasaran 2 : berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**
- **Tujuan (2) Meningkatkan Pemerataan Infrastruktur Wilayah**
 - **Sasaran 3 : Meningkatnya Akseibilitas Infrastruktur Wilayah**
- **Tujuan (3) Meningkatkan Kesejahteraan masyarakat secara merata**
 - **Sasaran 4 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor unggulan daerah**
 - **Sasaran 5 : Menurunnya kesenjangan Pendapatan antar lapisan masyarakat**
- **Tujuan (4) Meningkatkan Kualitas SDM yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter**
 - **Sasaran 6 : Meningkatnya Kualitas danPemerataan Pendidikan**
 - **Sasaran 7 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**
 - **Sasaran 8 : Meningkatnya keberdayaan perempuan dalam pembangunan**
 - **Sasaran 9 : Meningkatnya aktualisas nilai-nilai agama dan budaya**

dalam kehidupan masyarakat

- **Tujuan (5) Meningkatkan Produktivitas dan Nilai Tambah Produk Unggulan Daerah**
 - **Sasaran 10 : Meningkatnya hilirisasi ekonomi sektor unggulan daerah**
- **Tujuan (6) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan**
 - **Sasaran 11 : Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim**

Dari rumusan Tujuan RPD tersebut, dapat diidentifikasi keterkaitannya dengan tugas dan fungsi satuan polisi pamong praja , yaitu pada:

- **Tujuan (1) Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik**
 - **Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah**
 - **Sasaran 2 : berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik**

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai. Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga lainnya yang melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun dalam Program Bina Administrasi Kewilayahan dengan sasaran program yaitu meningkatnya konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah, serta penataan wilayah administrasi dan kawasan (kawasan khusus dan kawasan perkotaan), dan batas antar Negara; serta meningkatnya standardisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat serta pencegahan dan penganggulangan bencana dan bahaya kebakaran. Adapun Indikator Kegiatan Program (IKP) Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yaitu:

- a. Presentase kinerja peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
- c. Tertibnya penataan wilayah administrasi batas antar daerah;

- d. Peningkatan efektivitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat;
- e. Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal);
- f. Penyediaan layanan dasar bidang penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu–isu dan analisis strategik dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024- 2026 yaitu :

1. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik;
dan sasaran dalam pencapaian tujuan yang akan dilaksanakan, yaitu :
 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan;
 2. Berkembangnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Tujuan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sesuatu yang akan dicapai dimasa yang akan datang. Perumusan tujuan akan mengarahkan kepada perumusan sasaran, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Provinsi Sulawesi Selatan, pada dasarnya sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Perundang–undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Provinsi Sulawesi Selatan. Sejalan dengan Misi Pertama ‘Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif’ dan Misi Keempat ‘Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif.

Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan rancangan awal RKPD maka Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan 2024 terdiri atas 4 (Empat) Program, 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 55 (Lima

Puluh Lima) Sub Kegiatan dengan jumlah pagu indikatif sebesar Rp. 48.046.743.751,00. Rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

TABEL T-C.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PROVINSI SULAWESI SELATAN

Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
			Rencana Tahun 2024 (Tahun rencana)			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			target capaian kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu indikatif	Sumber dana		target capaian kinerja	Kebutuhan Dana /Pagu indikatif		
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Temuan LHP Yang Selesai Ditindaklanjuti	100 %	42.889.885.374,00	APBD		100 %	43.049.885.374,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
		Persentase ASN berkinerja baik dan sangat baik	100 %	0,00			100 %	0,00		
		Nilai Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program	100 %	0,00			100 %	0,00		
1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11 Dokumen	508.343.100,00	APBD		11 Dokumen	508.343.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	330.000.000,00	APBD		12 Dokumen	330.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	63.343.100,00	APBD		1 Dokumen	63.343.100,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

1.05.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	15.000.000,00	APBD		1 Dokumen	15.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	20.000.000,00	APBD		1 Dokumen	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	30.000.000,00	APBD		1 Laporan	30.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	35.000.000,00	APBD		4 Laporan	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	32 Laporan	21.120.742.755,00	APBD		32 Laporan	21.160.742.755,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan	20.975.617.755,00	APBD		150 Orang/ Bulan	20.975.617.755,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	67.052.000,00	APBD		12 Dokumen	77.052.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	21.107.000,00	APBD		1 Laporan	41.107.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	20 Dokumen	10.516.000,00	APBD		20 Dokumen	20.516.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan	46.450.000,00	APBD		18 Laporan	46.450.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Yang Dikelola oleh Perangkat Daerah	300 Unit	22.000.000,00	APBD		310 Unit	22.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	10.000.000,00	APBD		2 Dokumen	10.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	12.000.000,00	APBD		3 Dokumen	12.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	350 Laporan	275.800.000,00	APBD		360 Laporan	275.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	148 Paket	205.800.000,00	APBD		148 Paket	205.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	148 Dokumen	70.000.000,00	APBD		148 Dokumen	70.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Unit Penyediaan Sarana dan Prasarana Umum	250 Unit	547.551.000,00	APBD		250 Unit	581.551.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		Jumlah Tamu Yang difasilitasi	120 Orang	0,00	APBD		120 Orang	0,00		
1.05.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket	7.500.000,00	APBD		50 Paket	7.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	250 Paket	17.250.000,00	APBD		250 Paket	17.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	180 Paket	52.800.000,00	APBD		180 Paket	52.800.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen	24.200.000,00	APBD		12 Dokumen	24.200.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

1.05.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	17.250.000,00	APBD		12 Laporan	37.250.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	300.000.000,00	APBD		100 Laporan	314.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen	28.551.000,00	APBD		500 Dokumen	28.551.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD		1 Dokumen	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	9 Unit	450.000.000,00	APBD		9 Unit	530.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.1.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	APBD		4 Unit	180.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	100.000.000,00	APBD		2 Unit	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	50.000.000,00	APBD		1 Paket	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	APBD		1 Unit	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000,00	APBD		1 Unit	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24 Laporan	19.270.448.519,00	APBD		24 Laporan	19.276.448.519,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	29.598.000,00	APBD		12 Laporan	35.598.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

1.05.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	19.240.850.519,00	APBD		12 Laporan	19.240.850.519,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	76 Unit	695.000.000,00	APBD		85 Unit	695.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit	275.000.000,00	APBD		25 Unit	275.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	200.000.000,00	APBD		9 Unit	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	41 Unit	100.000.000,00	APBD		41 Unit	100.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	120.000.000,00	APBD		1 Unit	120.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada di Provinsi	100 %	4.085.000.000,00	APBD		100 %	4.815.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Persentase Penanganan Gangguan Ketertiban dan ketertiban umum Lintas Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	100%	3.045.000.000,00	APBD		100%	3.655.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.1.01.01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan	277 Kasus	750.000.000,00	APBD		277 Kasus	790.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

	Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pengawasan								
1.05.02.1.01.02	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	45 Kasus	1.300.000.000,00	APBD		50 Kasus	1.500.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.02.1.01.03	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	16 Dokumen	230.000.000,00	APBD		16 Dokumen	270.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.02.1.01.04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50 Dokumen	100.000.000,00	APBD		50 Dokumen	130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.02.1.01.05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	240 Orang	280.000.000,00	APBD		240 Orang	450.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.02.1.01.06	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen	50.000.000,00	APBD		5 Dokumen	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.02.1.01.07	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	150 Unit	250.000.000,00	APBD		200 Unit	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.02.1.01.08	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	10 Dokumen	35.000.000,00	APBD		10 Dokumen	35.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

1.05.02.1.01.09	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	2 Laporan	50.000.000,00	APBD		2 Laporan	80.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Presentase Tingkat Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda dan Perkada	100 %	840.000.000,00	APBD		100 %	960.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.1.02.01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	3 Laporan	320.000.000,00	APBD		3 Laporan	370.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.02.1.02.02	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	70 Laporan	220.000.000,00	APBD		70 Laporan	240.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.02.1.02.03	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Sesuai SOP	25 Laporan	300.000.000,00	APBD		25 Laporan	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Jumlah Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	8 Orang	200.000.000,00	APBD		8 Orang	200.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.02.1.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda	25 Laporan	150.000.000,00	APBD		25 Laporan	150.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.02.1.03.02	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS	Jumlah Dokumen Pemberkasan Administrasi Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda, Jumlah Perkara yang dapat disidangkan di tempat, dan penerapan secara aktif operasional Sekretariat Bersama PPNS oleh Dinas Satpol PP	30 Dokumen	50.000.000,00	APBD		30 Dokumen	50.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani	100 %	725.000.000,00	APBD		100 %	835.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi	Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana	100 %	325.000.000,00	APBD		100 %	355.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.03.1.01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Tersedia untuk Melaksanakan Sosialisasi KIE Rawan Bencana (Per Jenis Bencana) Lintas Kabupaten/Kota	80 Orang	325.000.000,00	APBD		80 Orang	355.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100 %	300.000.000,00	APBD		100 %	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.03.1.02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Memperoleh Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	100 Orang	300.000.000,00	APBD		100 Orang	350.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100 %	100.000.000,00	APBD		100 %	130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.03.1.04.03	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen	100.000.000,00	APBD		2 Dokumen	130.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	100 %	346.858.377,00	APBD		100 %	346.858.377,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	Cakupan Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	50 %	146.155.000,00	APBD		50 %	146.155.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.04.1.01.03	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	4 Laporan	76.500.000,00	APBD		4 Laporan	76.500.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN

1.05.04.1.01.04	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	12 Dokumen	20.000.000,00	APBD		12 Dokumen	20.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.04.1.01.09	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	2 Orang	49.655.000,00	APBD		2 Orang	49.655.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	100%	200.703.377,00	APBD		100%	200.703.377,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
1.05.04.1.02.01	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Laporan	90.703.377,00	APBD		24 Laporan	90.703.377,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	SULAWESI SELATAN
1.05.04.1.02.02	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	24 Laporan	110.000.000,00	APBD		24 Laporan	110.000.000,00	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
				48.046.743.751,00				49.046.743.751,00		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan yang disusun berdasarkan Rencana kerja perangkat daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026.

Rencana Kerja ini juga merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, sehingga target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Rencana Kerja Satuan Polis Pamong Praja Tahun 2024 merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2024.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut sebagai upaya dalam mendukung capaian indikator kinerja maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja 2024 dengan efektif dan efisien;
2. Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai langkah awal dalam penyusunan Anggaran Tahun 2024 dimana Rencana Kerja di jabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
3. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integritas dan efisiensi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja seluruh aparaturnya secara berjenjang wajib melaksanakan pengawasan dan pengendalian;
4. Rencana Kerja Tahun 2024 mengacu pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Rencana Kerja Tahun 2024 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan penerapan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 disusun dan dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2024.

Makassar, 03 Oktober 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Selatan**

ANDI ARWIN AZIS, S.STP., MM
Pangkat Pembina Utama Madya
NIP. 19760105 199511 1 001